



BPPBJ

Badan Pelayanan Pengadaan
Barang/Jasa Prov. DKI Jakarta

**PERUBAHAN RENCANA
KERJA BADAN PELAYANAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2021**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenan-Nya Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 dapat disusun dengan baik.

Renja merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang disusun dengan memedomani Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020. Secara substansi, dokumen Renja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2020 memuat hasil evaluasi Renja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa tahun lalu (n-2), tujuan dan sasaran Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa, serta rencana kerja dan pendanaan Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa.

Kami sadari bahwa masih terdapat kekurangan yang membutuhkan perbaikan dan penyempurnaan dalam perencanaan pembangunan, khususnya urusan Keuangan. Oleh karena itu, rekomendasi yang konstruktif tetap akan menjadi masukan dalam identifikasi permasalahan pembangunan, arah kebijakan pembangunan, program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja, penyelarasan dengan sasaran dan prioritas nasional, dan identifikasi program dan kegiatan menurut kewenangan Provinsi dan Kota/Kabupaten di masa yang akan datang.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan dokumen Renja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020. Semoga Allah SWT senantiasa meridhai kita semua.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	
Daftar Isi	i-1
Executive Summary	i-3
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-2
1.2. Landasan Hukum	I-3
1.3. Maksud dan Tujuan	I-6
1.4. Sistematika Penulisan	I-7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	II-1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	II-2
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-11
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	II-13
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	II-13
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II-18
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	III-1
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	III-2
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	III-3
3.3. Program dan Kegiatan	III-4
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	IV-1
4.1. Rencana Kerja, Target, dan Pendanaan	IV-2
BAB V PENUTUP	V-1
Lampiran I Tabel 2.1 Realisasi Capaian Program Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019	
Lampiran II Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa s.d tahun 2020 Provinsi DKI Jakarta	
Lampiran III Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Badan Pelayanan Pegadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta s.d. Tahun 2019.	
Lampiran IV Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021	

Provinsi DKI Jakarta.

- Lampiran V Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022.
- Lampiran VI Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2021 dan Perkiraan Maju Tahun 2022 Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta
- Lampiran V Tabel 4.1 Rencana Kerja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2021

EXECUTIVE SUMMARY

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Perubahan Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 – 2022 dan mengacu pada Pasal 16 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Selain itu, penyusunan Renja Perubahan Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa juga berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2017 – 2022 sebagai penjabaran dari RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 – 2022 urusan Pengadaan Barang/Jasa.

Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 – 2022 telah melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan proses Pengadaan Barang/Jasa oleh Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa (UPPBJ) serta pelayanan Pengadaan Barang/Jasa tertentu memiliki kewenangan untuk menyusun kebijakan, pedoman dan standar teknis pelayanan proses Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Program dan indikator kinerja dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 – 2022 yang mendukung peningkatan kualitas Pengadaan Barang/Jasa adalah sebagai berikut :

1. Persentase pengadaan Barang/Jasa tepat waktu
2. Persentase penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa.

Proses penyusunan Perubahan Renja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta mengacu RKPD-Perubahan Provinsi DKI Jakarta, Selain itu juga dengan mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap Renja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa tahun sebelumnya, target kinerja tahun 2021 dalam Renstra Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2017-2022 dan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional. Ada 41 dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa tahun 2021.

Terdapat 1 (satu) program utama yang diampu oleh Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa yaitu program program Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu terdapat 2 (dua) program yang bersifat umum dan digunakan oleh seluruh OPD.

Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2021 adalah mendukung tercapainya Misi ke-3 RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022, secara berurutan yaitu “Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas

Jakarta, 15 Oktober 2021

Plt.Kepala Badan Pelayanan Pengadaan
Barang/Jasa
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta



Sigit Wijatmoko
NIP. 197408301993111001

PENDAHULUAN

Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud &
Tujuan, Sistematika Penulisan



1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Penyusunannya berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menyusun Renja sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Hal tersebut ditegaskan kembali dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang dalam pasal 15 Ayat (1) mengamatkan bahwa "Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah".

Proses penyusunan Renja Perubahan Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta mengacu pada RKPD-Perubahan Provinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu penyusunan Renja Perubahan Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD-Perubahan Tahun 2021. Selain itu juga dengan mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap Renja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa tahun sebelumnya, target kinerja tahun 2021 dalam Renstra Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2017-2022 dan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2020, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
21. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020;
22. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;
24. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
25. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
27. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;

28. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
29. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah, dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
30. Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha;
31. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
32. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2015 tentang Pengenaan Kompensasi Terhadap Pelampauan Nilai Koefisien Lantai Bangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2016;
33. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022;
34. Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah;
35. Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Permukiman Dalam Rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu;
36. Peraturan Gubernur Nomor 261 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa;
37. Keputusan Gubernur Nomor 1959 Tahun 2018 tentang Standardisasi Usulan Kegiatan Rembuk Rukun Warga Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020);
38. Keputusan Gubernur Nomor 1959 Tahun 2018 tentang Standardisasi Usulan Kegiatan Rembuk Rukun Warga Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
39. Keputusan Gubernur Nomor 1042 Tahun 2018 tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah;
40. Keputusan Gubernur Nomor 138 Tahun 2019 tentang Daftar Infrastruktur Khusus Kegiatan Strategis Daerah;

41. Keputusan Gubernur Nomor 150 Tahun 2019 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
42. Instruksi Gubernur Nomor 118 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Musrenbang Tahun 2019 Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
43. Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
44. Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana kerja Pemerintah Daerah tahun 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Perubahan Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 disusun untuk mewujudkan target kinerja tahun 2021 dengan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki.

Adapun tujuan penyusunan Renja Perubahan Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa ke dalam rencana operasional tahunan;
2. Menyediakan arahan/pedoman bagi aparatur Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2021;
3. Menjadi alat ukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan tugas Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa.

Sesuai dengan dokumen RKPD Perubahan Tahun 2021, tema pembangunan pada tahun 2021 adalah **"Pemantapan Pertumbuhan Berkualitas untuk Stabilitas Pembangunan, dengan focus Pemulihan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat"**. Berkualitas di sini dimaknai dengan hasil pertumbuhan dan pembangunan Provinsi DKI Jakarta secara merata dapat dinikmati oleh seluruh warga Jakarta.

1.4 Sistematika Penulisan

Sebagaimana telah diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dokumen Renja Perubahan Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dijabarkan penjelasan ringkas tentang Renja perangkat daerah, keterkaitan antara Renja dengan RKPD dan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah, serta proses penyusunan Renja.

**BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU**

Bab ini berisi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 (n-2) dan perkiraan capaian tahun 2020 (n-1); analisis kinerja pelayanan Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa; isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta; review terhadap RKPD Tahun 2021 dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang bersumber dari hasil Rembuk RW, usulan langsung masyarakat.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini dijabarkan penelaahan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa, program dan kegiatan.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi uraian penutup yang terdiri atas catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan
Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-
isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi, Review
Ranwal RKPD, Penelaahan Program dan Kegiatan
Masyarakat



2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa

Pada bagian ini menjelaskan tentang evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2019 dan Capaian Renstra Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa pada Tahun 2019. Fungsi evaluasi ini adalah dalam rangka penyediaan informasi-informasi yang berguna untuk menentukan strategi dan kegiatan Renja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2021. Evaluasi atau reviu akan dilakukan terhadap realisasi program dan kegiatan Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2019 serta realisasi target sasaran Renstra Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa pada Tahun 2019. Selain itu juga akan dilakukan reviu terhadap pelaksanaan kegiatan tahun 2020 dan realisasi anggaran tahun 2020.

Reviu hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2019 ditinjau dari capaian program dapat dilihat dalam Tabel 2.1. Program yang digunakan pada tahun 2019 berbeda dengan program yang digunakan untuk tahun 2019-2022 dalam Renstra Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2017-2022, sebab proses penyusunan Rencana Kerja Tahun 2019 dilakukan pada tahun 2018 dan proses penyusunan RPJMD serta Renstra OPD masih berlangsung sampai dengan tahun 2019. Landasan penggunaan program tahun 2019 adalah Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 tentang Penetapan Daftar Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Menurut Urusan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018.

Terdapat 1 (satu) program utama yang diampu oleh Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa yaitu program Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang/Jasa Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa. Selain itu terdapat 1 (satu) program yang bersifat umum dan digunakan oleh seluruh OPD yaitu program "Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor SLPD/UKPD Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa dan Program Pengelolaan Kendaraan Operasional SKPD/UKPD Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa".

Realisasi capaian program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan yang terdiri dari 2 (dua) indikator antara lain yaitu sebanyak 2 (dua) indikator realiasi

capaian sesuai dengan target, indikator realiasi capaian melebihi target, dan indikator realiasi capaian tidak tercapai dengan nilai capaian 0% (nol persen).

Tabel 2.1 Realisasi Capaian Program Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019

No	Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang/Jasa	Persentase pengadaan Barang/Jasa tepat waktu	Jumlah Pengadaan barang/jasa tepat waktu dibagi jumlah paket lelang yang sudah selesai. Tepat waktu adalah lebih cepat atau sama dengan standar waktu sesuai ketentuan/peraturan	87,5	87,5	100%	
2.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor SKPD/UKPD Pelayanan Pengadaan Barang Jasa	indeks kepuasan pelayanan kantor	Indeks kepuasan pelayanan kantor berdasarkan pelaksanaan program pada money. Index 1 = 0-25%, index 2 = >25%-50%, index 3 = >50%-75% dan Index 4 = >75%-100%	4	4	100%	
3.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional SKPD/UKPD Pelayanan Pengadaan Barang Jasa	indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	Indeks kepuasan pelayanan KDO berdasarkan pelaksanaan program pada money. Index 1 = 0-25%, index 2 = >25%-50%, index 3 = >50%-75% dan Index 4 = >75%-100%.	4	4	100%	

Untuk realisasi capaian Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang/Jasa yang memiliki 2 (dua) indikator adalah sebesar 100% (Seratus persen).

Secara rinci hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa dan pencapaian Renstra Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa sampai dengan Tahun 2019, dapat dilihat pada tabel 2.2. Dalam tabel dimaksud dapat dilihat capaian masing-masing kegiatan Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa pada Tahun 2019 dan 2020. Pada tahun 2019, 20 target kegiatan dapat dicapai, hanya 3 target kegiatan belum dapat dicapai. Berikut daftar kegiatan Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa yang tidak mencapai target pada tahun 2019:

1. Penyediaan sewa mesin fotokopi, karena nilai kontrak sewa mesin fotokopi lebih rendah dari nilai pagu anggaran dalam e-budgeting.
2. Sosialisasi dan Publikasi peraturan pengadaan barang/jasa, karena terjadinya efisiensi yang mengakibatkan tidak keluarnya SPD (Surat Penyediaan Dana) sehingga hanya 7 kali melakukan kegiatan yang seharusnya 12 kegiatan .
3. Penyediaan jasa administrasi keuangan, karena nominal untuk biaya administrasi Bank DKI lebih rendah dari nominal yang tercantum didalam DPA

Pada tahun 2020 rata-rata realisasi kegiatan di BPPBJ terhitung rendah karena adanya rasionalisasi kegiatan belanja langsung pada DPA Tahun Anggaran 2020. Sesuai SE Sekda nomor 46/SE/2020 disebutkan bahwa para SKPD melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan untuk percepatan penanganan COVID-19 dan melakukan penundaan terhadap kegiatan yang belum dilaksanakan dan belum diterbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD).

Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa s.d. Tahun 2020 Provinsi DKI Jakarta

Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) (Outcomes) / Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Keluaran Kegiatan s/d tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun 2019			Target kegiatan (Renja tahun 2020)	Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2020	
						Target Renja tahun 2019	Realisasi Renja tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Kegiatan s/d 2020	Tingkat Capaian Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	4	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan									
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	4 06	Keuangan									
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	4 06 01	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Persentase Pengadaan Barang/Jasa Tepat Waktu	90	100	87,5	100	114%	90	97	107%
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	4 06 01 001	Pengembangan sistem pengadaan barang/jasa	Jumlah Sistem/Modul yang dikembangkan		22	5	5	100%	3		
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	4 06 01 002	Implementasi sistem informasi pengadaan barang/jasa	Tersedianya belanja jasa petugas penunjang kegiatan		12	12	12	100%			
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	4 06 01 002	Implementasi sistem informasi pengadaan barang/jasa	Jumlah Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa yang Terimplementasi						5		
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	4 06 01 003	Pelaksanaan FGD Permasalahan Barang/Jasa	Terlaksananya pelaksanaan FGD permasalahan barang/jasa			6	6	100%			
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	4 06 01 003	Pelaksanaan FGD Permasalahan Barang/Jasa	Jumlah laporan FGD permasalahan barang/jasa						4		
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	4 06 01 004	Penyediaan tenaga ahli/nara sumber dalam proses pengadaan barang/jasa	Tersedianya Tenaga Ahli/Nara Sumber Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa		200	200	200	100%			
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	4 06 01 004	Penyediaan tenaga ahli/nara sumber dalam proses pengadaan barang/jasa	Jumlah laporan kinerja tenaga ahli/narasumber						12		

Rencana Kerja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program Renstra Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Kegiatan s/d tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019			Target kegiatan tahun 2020)	Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2020	
						Target Renja tahun 2019	Realisasi Renja tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Kegiatan Renstra s/d 2020	Tingkat Capaian Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	4 06 01	005	Penyediaan jasa tenaga pendukung pokja dan tenaga asisten pengelola barang/jasa	dalam proses pengadaan barang/jasa					12		
	4 06 01	008	Pembinaan dan pengembangan SDM pengelola pengadaan barang/jasa	Jumlah laporan kinerja tenaga pendukung Pokja pemilihan Barang/Jasa		1600	1600	100%	300		
				Jumlah peserta pembinaan an pengembangan SDM pengelola pengadaan Barang/Jasa yang meningkatkan kualitas pengadaan Barang/Jasa							
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	4 06 01	010	Penyusunan pedoman dan standar pelaksanaan pengadaan barang/jasa	Jumlah dokumen pedoman dan standar pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang tersusun		7	7	100%	7		
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	4 06 01	011	Sosialisasi dan publikasi peraturan pengadaan barang/jasa	Terlaksananya sosialisasi dan publikasi peraturan pengadaan barang/jasa		12	6	50%			
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	4 06 01	011	Sosialisasi dan publikasi peraturan pengadaan barang/jasa	Jumlah peserta sosialisasi dan peraturan pengadaan barang/jasa		12	6	50%	600		
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	4 06 02		Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor SKPD/UKPD Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor	4	4	4	100%	4	4	100%
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	4 06 02	001	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya mesin fotokopi untuk BPPBJ dan UPPBJ		8	8	100%			
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	4 06 02	001	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai kepuasan pelayanan terhadap penyediaan mesin fotokopi					4		
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	4 06 02	002	Penyediaan Makanan dan Minuman	Waktu penyediaan makanan dan minuman	12						

Rencana Kerja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Kode		Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Keluaran Kegiatan s/d tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019			Target kegiatan (Rencana tahun 2020)	Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2020	
							Target Rencana tahun 2019	Realisasi Rencana tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Kegiatan s/d 2020	Tingkat Capaian Renstra (%)
1	4	06 02	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	4	06 02	002	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat pegawai BPPBJ dan UPPBJ		22080	22080	100%			
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	4	06 02	002	Penyediaan Makanan dan Minuman	Nilai kepuasan pelayanan kantor terhadap penyediaan makanan dan minuman					4		
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	4	06 02	003	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Waktu penyediaan barang cetakan	12						
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	4	06 02	003	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan untuk BPPBJ dan UPPBJ		11	11	100%			
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	4	06 02	003	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai kepuasan pelayanan terhadap kebutuhan kantor cetakan dan penggandaan					4		
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	4	06 02	004	Penyediaan jasa dan Pengadaan perlengkapan kebersihan kantor	Waktu penyediaan peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor	12						
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	4	06 02	004	Penyediaan jasa dan Pengadaan perlengkapan kebersihan kantor	Tersedianya perlengkapan kebersihan kantor untuk BPPBJ dan UPPBJ		15	15	100%			
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	4	06 02	004	Penyediaan Pengadaan perlengkapan kebersihan kantor	Nilai kepuasan layanan kebersihan kantor					4		
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	4	06 02	005	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Waktu penyediaan peralatan rumah tangga	12						
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	4	06 02	005	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga untuk BPPBJ dan UPPBJ		5	5	100%			
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	4	06 02	005	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai kepuasan layanan peralatan rumah tangga					4		

Rencana Kerja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Kegiatan s/d tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun 2019			Target kegiatan (Rencana tahun 2020)		Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2020	
						Target Renja tahun 2019	Realisasi Renja tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Kegiatan Renstra s/d 2020	Tingkat Capaian Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10		11=(6+8+10)	12=(11/5)
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	4 06 02	006	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Waktu penyediaan alat tulis kantor	12							
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	4 06 02	006	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor untuk BPPBJ dan UPPBJ		34	34	100%				
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	4 06 02	008	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Nilai Kepuasan Pelayanan Kantor terhadap perlengkapan kantor					4			
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	4 06 02	007	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja	Waktu pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja	12							
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	4 06 02	007	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja	Tersedianya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja		265	265	100%				
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	4 06 02	007	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja	Jumlah peralatan perlengkapan kerja yang terpelihara					265			
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	4 06 02	008	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor untuk BPPBJ dan UPPBJ		30	30	100%				
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	4 06 02	008	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Kepuasan Penyediaan Perlengkapan Kantor					4			
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	4 06 02	009	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	12	12	12	100%				
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	4 06 02	009	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Persentase penyelesaian administrasi keuangan					100			
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	4 06 02	010	Penyediaan jasa petugas penunjang kegiatan kantor/lapangan	Tersedianya jasa petugas penunjang kegiatan kantor/lapangan	20	20	20	100%				
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	4 06 02	010	Penyediaan jasa petugas penunjang kegiatan kantor/lapangan	Jumlah laporan kinerja petugas					12			

Rencana Kerja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Keluaran Kegiatan s/d tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019			Target kegiatan (Renja tahun 2020)	Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2020	
						Target Renja tahun 2019	Realisasi Renja tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Kegiatan s/d 2020	Tingkat Capaian Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	4 06 02	011	Pengelolaan arsip pengadaan barang/jasa						12		
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	4 06 03		Program Pengelolaan Kendaraan Operasional SKPD/UKPD Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	4	4	4	4	100	4		
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	4 06 03	001	Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus/Peralatan Kerja		21480	34500	34500	100			
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	4 06 03	001	Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus/Peralatan Kerja						22		
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	4 06 03	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		21	22	22	100	22		
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	4 06 03	003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan operasional		21	22	22	100	22		

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing- masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan format Tabel T-C.30 sebagai berikut:

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta

Dari hasil identifikasi permasalahan di Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta dapat dikemukakan di atas dan ada hal-hal lain yang dianggap penting dan relevan sebagai berikut:

1. Kasus hukum yang menjadi headline pemberitaan;
2. Sulitnya memenuhi jumlah staf sesuai dengan analisa beban kerja
3. Pemanggilan/gugatan oleh pihak eksternal atas penerapan strategi pengadaan;
4. Beban kerja yang tidak seimbang antar fungsi;
5. Batal lelang atau batal kontrak.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

Perbandingan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan tidak terdapat perbedaan yang signifikan.

Lampirkan table berikut.

Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir Renja PD-P Tahun 2021
Provinsi DKI Jakarta

Nama Perangkat Daerah: Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa											
Rancangan Akhir RKPDP			Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting				
Perangkat Daerah/ Unit Kerja pada Perangkat Daerah	No.	Program/Sub Kegiatan/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif (Rp. 000)		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp. 000)
(1) BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA	(2) 1	(3) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	(4) DKI Jakarta	(5) Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor	(6) 4 Indeks	(7) 74.591.532.556	(8) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor SKPD/UKPD Pelayanan Pengadaan Barang Jasa	(9) DKI Jakarta	(10) Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor	(11) 74.591.532.556	(12) (12)
BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA	1.1	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	DKI Jakarta	Nilai kepuasan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai serta kepuasan penatausahaan Keuangan	4 Nilai	76.982.954	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	DKI Jakarta	Nilai kepuasan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai serta kepuasan penatausahaan Keuangan	76.982.954	
BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA	1.1.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	DKI Jakarta	Nilai kepuasan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai	4 Nilai	69.472.954.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DKI Jakarta	Nilai kepuasan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai	69.472.954.000	
BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA	1.1.02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DKI Jakarta	Nilai Kepuasan Penatausahaan Keuangan	100%	7.510.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DKI Jakarta	Nilai Kepuasan Penatausahaan Keuangan	7.510.000	
BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA	1.2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DKI Jakarta	Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum	4 Indeks	2.429.753.798	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DKI Jakarta	Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum	2.429.753.798	
BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA	1.2.01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DKI Jakarta	Nilai Kepuasan Pelayanan Kantor terhadap	4 Nilai	1.798.851.120	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DKI Jakarta	Nilai Kepuasan Pelayanan Kantor	1.793.423.280	

Rencana Kerja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Rencana Kerja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021

BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA	2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	DKI Jakarta	indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	4 Indeks	101.070.760	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	DKI Jakarta	indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	101.070.760
BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA	2.1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	DKI Jakarta	Indeks kepuasan kualitas barang milik daerah penunjang urusan	4 Indeks	101.070.760	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	DKI Jakarta	Indeks kepuasan kualitas barang milik daerah penunjang urusan	101.070.760
BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA	2.1.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	DKI Jakarta	Indeks kepuasan kualitas barang milik daerah penunjang urusan	4 Nilai	12.618.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	DKI Jakarta	Indeks kepuasan kualitas barang milik daerah penunjang urusan	12.618.000
BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA	2.1.02	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DKI Jakarta	Indeks kepuasan kualitas barang milik daerah penunjang urusan	110 unit	88.452.760	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DKI Jakarta	Indeks kepuasan kualitas barang milik daerah penunjang urusan	88.452.760
BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA	3	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	DKI Jakarta	Indeks kepuasan kualitas barang milik daerah penunjang urusan	92,5%	3.063.202.662	Program Peningkatan Kualitas Pengadaan barang/Jasa	DKI Jakarta	Indeks kepuasan kualitas barang milik daerah penunjang urusan	3.063.202.662
BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA	3.1	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	DKI Jakarta	Indeks kepuasan kualitas barang milik daerah penunjang urusan	5 Sistem	1.432.814.150	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	DKI Jakarta	Indeks kepuasan kualitas barang milik daerah penunjang urusan	1.432.814.150
BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA	3.1.01	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	DKI Jakarta	Indeks kepuasan kualitas barang milik daerah penunjang urusan	3 modul	745.200.000	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	DKI Jakarta	Indeks kepuasan kualitas barang milik daerah penunjang urusan	745.200.000

Rencana Kerja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021

BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA	3.1.02	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	DKI Jakarta	Jumlah sistem informasi pengadaan barang.jasa yang terimplementasi	5 Buah	687.614.150	Implementasi sistem informasi pengadaan barang/jasa	DKI Jakarta	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	687.614.150
BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA	3.2.	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	DKI Jakarta	Jumlah laporan kinerja Tenaga Ahli/Nara Sumber serta laporan FGD Dalam Proses Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa	12 Laporan	398.400.000	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	DKI Jakarta	Jumlah laporan kinerja Tenaga Ahli/Nara Sumber serta laporan FGD Dalam Proses Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa	398.400.000
BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA	3.2.01	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	DKI Jakarta	Jumlah laporan FGD permasalahan barang/jasa	4 laporan	14.000.000	Pelaksanaan FGD permasalahan barang/jasa	DKI Jakarta	Jumlah laporan FGD permasalahan barang/jasa	71.600.000
BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA	3.2.02	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	DKI Jakarta	Jumlah laporan kinerja tenaga ahli/nara sumber dalam proses pengadaan barang/jasa	12 Laporan	384.800.000	Penyediaan tenaga ahli/nara sumber dalam proses pengadaan barang/jasa	DKI Jakarta	Jumlah laporan kinerja tenaga ahli/nara sumber dalam proses pengadaan barang/jasa	422.000.000
BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA	3.3	Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	DKI Jakarta	Jumlah dokumen pedoman dan standar pelaksanaan serta laporan tenaga pendukung pokja	12 laporan	1.231.588.512	Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	DKI Jakarta	Jumlah dokumen pedoman dan standar pelaksanaan serta laporan tenaga pendukung pokja	1.231.588.512

Rencana Kerja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021

BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA	3.3.01	Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Tenaga Pendukung Pokja dan Tenaga Asisten Pengelola Barang/Jasa	12 Laporan	1.231.588.512	Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Tenaga Pendukung Pokja dan Tenaga Asisten Pengelola Barang/Jasa	1.231.588.512
---	--------	--------------------------------------	-------------	--	---------------	---------------	---	----------------	--	---------------

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BPPBJ tidak memiliki usulan program kegiatan masyarakat karena fungsi BPPBJ adalah melayani pengadaan barang/jasa sesuai usulan dari SKPD/UKPD.

Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021
Provinsi DKI Jakarta
Nama Perangkat Daerah: Badan Pelayanan Pengadaan Barang/jasa

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-	-	-	-	-	-

TUJUAN & SASARAN PERANGKAT DAERAH

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan
dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, Program
dan Kegiatan



3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1 Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020

Kebijakan Nasional yang menjadi salah satu rujukan bagi Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2021 adalah Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 dengan tema “Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas”. RKP Tahun 2021 adalah RKP transisi, menunggu RPJMN Tahun 2020-2024 selesai disusun, sehingga dalam menentukan stuktur prioritasnya menggunakan RKP sebelumnya.

Prioritas Pembangunan Nasional pada RKP Tahun 2021 antara lain yaitu:

- 1. Pembangunan manusia;
- 2. Penguatan konektivitas;
- 3. Peningkatan nilai tambah ekonomi;
- 4. Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air;
- 5. Stabilitas keamanan nasional.

Merujuk kepada lima prioritas tersebut, tidak ada yang berkaitan secara langsung dengan tugas dan fungsi Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta selaku pengemban urusan Keuangan

3.1.2 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)

TPB/SDGs merupakan kerangka kerja pembangunan yang memiliki tiga dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. TPB/SDGs diformulasikan ke dalam 17 Goals, 169 Target/Sasaran, dan 241 Indikator. Dalam Gambar 3.1 terdapat rincian tujuh belas tujuan TPB/SDGs.

Gambar 3.1
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)



Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki keterkaitan erat terhadap 17 tujuan TPB/SGs.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2021 merujuk kepada Rencana Strategis Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022. Di mana tujuannya adalah mendukung tercapainya Misi ke-3 RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2020, secara berurutan yaitu "Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas. Sehingga tujuan dan sasaran Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta seperti yang terdapat dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2018	2019	2020	2021	2022
1.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Opini laporan keuangan daerah	0%	95%	96%	97%	98%

3.3 Program dan Kegiatan

Program yang digunakan Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa pada tahun 2021 berbeda dengan yang digunakan sebelumnya. Sebab, Renja 2018 adalah Renja peralihan yang tidak berpedoman kepada RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 dan RPJMD 2017-2022 belum mulai disusun.

Pada Renja 2021 menggunakan program yang terdapat di Renstra Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2017-2022 terdiri 1 program utama dan 2 program operasional. Program tersebut antara lain:

- 1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Rencana Kerja Perubahan Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2021 berserta rencana pendanaannya terdapat dalam Tabel 3.2 yang menampilkan program, kegiatan, dan rencana anggaran Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2020. Pada tahun ini terdapat 2 program dan 20 kegiatan. Penjelasan secara rinci terdapat dalam Tabel 3.2 berikut. Data anggaran pada Tabel 3.2 berdasarkan tarikan sistem smartapbddev2.jakarta.go.id

Tabel 3.2. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2021
dan Perkiraan Maju Tahun 2022 Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	4	Fungsi Lain Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		DKI Jakarta						
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	4 06	Keuangan		DKI Jakarta						
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	4 06 01	Program Kebijakan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Persentase Pengadaan Barang/Jasa Tepat Waktu	DKI Jakarta	92,5%	3.063.202.662	PAD		95%	3.081.086.080
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	4 06 01	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Sistem/Modul yang dikembangkan	DKI Jakarta	3 Modul	745.200.000	PAD		2 Modul	1.478.508.000
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	4 06 01	Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah sistem informasi pengadaan barang/jasa yang terimplementasi	DKI Jakarta	5 buah	687.614.150	PAD		5 Buah	1.602.578.080
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	4 06 01	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah laporan FGD permasalahan barang/jasa	DKI Jakarta	4 laporan	14.000.000	PAD		4 laporan	71.600.000
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	4 06 01	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah laporan kinerja tenaga ahli/nara sumber dalam proses pengadaan barang/jasa	DKI Jakarta	12 Laporan	384.800.000	PAD		12 Laporan	422.000.000
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	4 06 01	Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah laporan kinerja tenaga pendukung Pokja pemilih barang/jasa	DKI Jakarta	12 Laporan	1.231.588.512	PAD		12 Laporan	4.914.000.000

Rencana Kerja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021

Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	4	06	02	Program Penunjang urusan Pemerintahan daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor	DKI Jakarta	4 Indeks	74.679.985.316	PAD	4 Indeks
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	4	06	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DKI Jakarta	4 Nilai	69.472.954.000	PAD	4 Nilai
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	4	06	02	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DKI Jakarta	4 Nilai	224.789.800	PAD	4 Nilai
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	4	06	02	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	DKI Jakarta	4 Nilai	1.629.589.500	PAD	4 Nilai
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	4	06	02	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DKI Jakarta	4 Nilai	148.156.250	PAD	4 Nilai
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	4	06	02	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DKI Jakarta	4 Nilai	169.261.620	PAD	4 Nilai
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	4	06	02	17	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DKI Jakarta	4 Nilai	64.104.120	PAD	4 Nilai
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	4	06	02	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	DKI Jakarta	110 Unit	88.452.760	PAD	220 Unit
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	4	06	02	42	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DKI Jakarta	4 Nilai	7.510.000	PAD	100%
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	4	06	02	43	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DKI Jakarta	4 Nilai	2.456.545.158	PAD	12 Laporan
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	4	06	02	63	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	DKI Jakarta	12 Laporan	418.642.308	PAD	12 Laporan

Rencana Kerja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021

Pengadaan Barang/Jasa	4	06	03	Program Penunjang urusan Pemerintahan daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Kendaraan Operasional	DKI Jakarta	4 Nilai	12.618.000	PAD	4 Nilai	385.087.000
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	4	06	03	06	Jumlah KDO/KDO Khusus yang memiliki surat izin	DKI Jakarta	4 Nilai	12.618.000	PAD	22 unit	20.247.000
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	4	06	03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	DKI Jakarta	4 Nilai	12.618.000	PAD	22 unit	20.247.000

RENCANA KERJA & PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Renja Perangkat Daerah



Tabel 4.1. Berisi Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2021

NO	Perangkat Daerah	Urusan	Program	Outcome/Target	Sub Kegiatan	Output/Target	Pagu Kegiatan	Pagu Kegiatan Tahun 2022	Keterangan
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
1.	Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Keuangan	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Persentase Pengadaan Barang/Jasa Tepat Waktu	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Sistem/Modul yang dikembangkan	745.200.000	1.478.508.000	
2.	Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Keuangan	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Persentase Pengadaan Barang/Jasa Tepat Waktu	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	Jumlah sistem informasi pengadaan barang/jasa yang terimplementasi	687.614.150	1.602.578.080	
3.	Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Keuangan	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Persentase Pengadaan Barang/Jasa Tepat Waktu	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah laporan FGD permasalahan barang/jasa	14.000.000	71.600.000	
4.	Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Keuangan	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Persentase Pengadaan Barang/Jasa Tepat Waktu	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah laporan kinerja tenaga ahli/nara sumber dalam proses pengadaan barang/jasa	384.800.000	1.540.000.000	
5.	Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Keuangan	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Persentase Pengadaan Barang/Jasa Tepat Waktu	Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah laporan kinerja tenaga pendukung Pokja pemilih barang/jasa	1.231.588.512	4.914.000.000	
6.	Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai kepuasan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai	69.472.954.000		
7.	Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai kepuasan pelayanan terhadap penyediaan mesin fotokopi	224.769.600	480.000.048	
8.	Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor	Penyediaan alat tulis kantor	Nilai kepuasan pelayanan kantor terhadap perlengkapan kantor	1.629.589.500	959.975.465	
9.	Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Nilai kepuasan pelayanan terhadap kebutuhan kantor	148.156.250	69.412.568	

PENUTUP

Penutup dokumen Renja



Dokumen Renja Perubahan Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa 2021 merupakan perencanaan kerja untuk periode tahun 2021. Renja merupakan penjabaran dari Renstra Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2017-2022 dengan mempedomani RKPD Perubahan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021. Fungsi Renja Perubahan 2021 adalah sebagai pedoman operasional dalam melaksanakan program dan kegiatan Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa sebagai upaya mencapai tujuan dan sasaran Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2021.

Sebagai pedoman kerja, pelaksanaan Renja Perubahan Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2021 ditetapkan kaidah-kaidah sebagai berikut:

1. Seluruh aparaturnya Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta wajib melaksanakan program dan kegiatan dalam Renja Perubahan Tahun 2021 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Anggaran pelaksanaan Renja Perubahan Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2021 akan dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP) Tahun 2021;
3. Pelaksanaan DPAP Tahun 2021 akan dimonitoring setiap bulan dan dilaporkan kepada Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa setiap 3 bulan. Pada akhir tahun pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2021 akan dievaluasi sebagai bahan penyusunan Renja Perubahan 2021.

Selanjutnya, Renja Perubahan Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 akan dijabarkan ke dalam Rencana Aksi 2021 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP) Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2021.

Jakarta, 15 Oktober 2021

Plt. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan
Barang/Jasa
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta



Sigit Wijatmoko
NIP. 197408301993111001